

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 343/KEP/BPP/2015

TANGGAL 28 SEPTEMBER 2015

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015

**DAFTAR INFOMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO		KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MAMFAAT JIKA DITUTUP
		<b>KEARSIPAN</b>				
1		Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j ;UU No.43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h ;	Sampai ada Persetujuan dari orang yang bersangkutan /pihak yang berwenang	Mengungkap Rahasia Pribadi	Melindungi data Pribadi
2		Arsip Peta Foto Udara	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d ; UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf d	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap Kekayaan Alam dan rahasia negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan

3		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I ; UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf i	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
4		Arsip Dinamis; aktif dan inaktif, yang berisikan :				
	a	Dokumen Keuangan, SPJ berikut lampirannya Dokument anggaran dan otorisasinya	UU.No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data Lengkap yang terlindungi Dalam proses penegakan hukum
	b	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/pe rorangan	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	Selama masih berlangsung penyelenggaraanya	Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan Intelektual	Melindungi hak atas Kekayaan intelektual
	c	Data Informasi pertahanan dan keamanan negara	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	Selama status Perlindungan Masih berlaku	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi Pertahanan dan keamanan negara
	d	Data kekayaan alam yang yang dilindungi	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	Pengukapan penguasaan atas sumber dungikekayaan alam yang dilindungi	Melindungi kekayaan alam yang dilindungi
	e	Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri ketahanan ekonomi	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi dan dapat meresahkan masyarakat	melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masvarakat

	f.	Akta otentik yang bersifat Pribadi dan wasiat	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	melindungi kepentingan kepemilikan Pribadi
	g.	Memorandum/ surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	mengganggu proses Pelaksanaan Kegiatan	melancarkan proses Pelaksanaan Kegiatan
5		Disposisi surat pimpinan	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	selama belum ada tindak lanjut dari SKPD Pengelola Surat	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan	mengamankan proses Penyusunan Kegiatan
		<b>BIDANG KEPENDUDUKAN</b>				
6		Data Pribadi Penduduk	UU No. 14 tahun 2008, pasal 17 huruf a dan huruf I, UU no. 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), (2), dan (3)	Sampai dengan terbitnya keputusan Mendagri/Gubernur/bupati/Walikota/tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
		<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>				
7		Rincian hasil Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
8		Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan peserta diklat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia Pribadi seorang PNS
9		Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/ pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia Pribadi seorang PNS

10		Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan di ungkap rahasianya	mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
11		Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan di ungkap rahasianya	mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
12		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	sampai ada keputusan tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Memperlancar proses penegakan hukum, Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
13		Data Rencana Penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14		Dokumen Hasil Sidang Baperjakat (notulen pertimbangan/ rekomendasi daftar nominasi/ rangking Pejabat Struktural	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan

15		Dokumen pengakatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara	mengamankan proses penyusunan kebijakan
16		SK Pengakatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai Berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan karena adanya Pengukapan secara Prematur	penyusunan kebijakan
17		Daftar Penjabat yang akan Dilantik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai Berlakunya SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18		Intrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses ten potensi/kompetensi PNS/pejabat	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan
19		Hasil Identifikasi potensi PNS	UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Tahun i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan, dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Mengamankan proses penyusunan kebijakan, melindungi rahasia pribadi seorang PNS

20	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21	Soal Tes CPNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	sampai selesai pelaksanaan tes	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan
22	Data Nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan pengumuman	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	melindungi rahasia pribadi seorang PNS, Mengamankan proses penyusunan kebijakan
23	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
24	Dokumen pengakatan, pemindahan guru PNS Dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU.No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25	SK pengakatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan

26		Daftar nilai DP3 PNS	UU. No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
27		Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	UU. No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum, melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
28		Keputusan ijin/keterangan tentang pencerain PNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
29		Dokumen pengelolaan kepegawain:(Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, Pensiun, dan administrasi kepegawain)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		<b>BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN</b>				
30		Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan kemandirian negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)

31	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan
	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
32	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	membantu kelancaran proses penegakan hukum
33	Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
34	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
	<b>BIDANG PEREKONOMIAN</b>				
35	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat(3)huruf b, KIP, Pasal 6 ayat(3)huruf b	sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan

36	Rencana Alokasi bersubsidi	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat(3)huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan
37	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk kabupaten	UU No. Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan
	<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>				
38	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	sampai dengan selesainya proses pelepasan tanah Kas Desa	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan
39	Kajian teknis penetapan lokasi dan basic Design Pengadaan dan basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	sampai terbitnya SP2LP (surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan)	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	ekonomi nasional mengamankan proses penyusunan kebijakan

40	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan
41	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai dengan ditetapkan keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	kelancaran proses tukar menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
42	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan kepala/wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai penerbitan keputusan	dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan
43	Keputusan Medagri tentang peresmian Pemberhentian dan pengangkatan kepala/wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf	sampai dengan Penyerahan SK	Penyerahan SK dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan
44	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Sumbar tentang Peresmian Pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/Pimpinan DPRD Padang Pariaman	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	sampai dengan penerbitan keputusan	dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan

45.	Penyaringan Bakal Calon Wali Nagari	UU No. 14 Tentang 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i	Selama diperlukan pengecualianya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
46	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon Wali Nagari	UU No. 14 tentang 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i	Selama diperlukan pengecualianya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	<b>BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI</b>				
47	Berita sandi	UU No 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
48	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
49	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
52	Jalur Komonikasi VVIP	UU No. 14 Th 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

53	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
54	Berita/Radiogram rahasia	UU No. Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
	<b>BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>				
55	Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b	selama masih berlaku	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang baik sehat
56	Laporan studi kelayakan Usaha Tambang( Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, kualitas Bahan Tambang, sebaran)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat(3) huruf b dan 17 huruf b daan d	Sampai dengan terpilihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mengukapkan kekayaan alam	melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
57	Data Teknis Potensi Air Tanah	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama potensi air tanah diperkirakan	Dapat mengukapkan kekayaan alam	mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
	<b>PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				
58	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara

59		Proses scanning UN/UNPK/UASBN	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
60		Hasil Test kemampuan fisik	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil test kemampuan fisik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
61		Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	melindungi hak atas kekayaan intelektual
		<b>BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN</b>				
62		Dokumen Perijinan beserta lampirannya	UU No Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Selama dokument masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	melindungi data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia
63		Catatan Penilaian Review Terhadap Riset Unggulan Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64		Data Debitur dana bergulir	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	melindungi rahasia pribadi debitur
65		Data keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	UU No. 14 Pasal 17 huruf b	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan

66	Surat keterangan Asal(SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor(API) dan dokument lainnya di bidang perdagangan luar negeri	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
	<b>BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</b>				
67	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	UU No. Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama diperakan masih ada	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (kordinat batas kawasan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara
68	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal loging/illegal trading yang masih dalam proses	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai dengan proses P21	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
69	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk publik	dapat mengukapkan kekayaan alam indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	melindungi/menjaga kekayaan alam indonesia (sumber daya plasma nutfah)

70		Proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
71		Peta kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut	UU No. 31 th 2004 tentang Perikanan UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan j UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber daya	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kekayaan alam
72		Hasil Uji Laboratorium untuk keperluan ekspor	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji ) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
73		Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur
		<b>BIDANG KESEHATAN</b>				
74		Identitas Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadis seseorang

75	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 47 ayat(2), UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
76	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU No. 14 th 2008 tentang UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i, UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1)	sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	melindungi rahasia pribadi pasien
77	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i, UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 44 ayat (3)	Samapi ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	melindungi rahasia pribadi pasien
78	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 48 dan pasal 51 huruf c, UU No. 14 th 2008 tentang KIP, PASAL 6(3)HURUF D, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
79	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	UU No 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 9 ayat(2) dan pasal 74 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

80		Hasil audit terkait dengan medical error	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 9 ayat(2) dan pasal 74 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat(3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
81		Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dan atau sejenis	UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 33 dan 34, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 14, UU No. 36 th 2009 tentang Kesehatan, pasal 98 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
		<b>BIDANG SOSIAL, KETENAGA KERJAAN &amp; PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
82		Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (jayandu) Widuri	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak pribadi
83		Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pedampingan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/ pengobatan korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi(riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik & psikis seseorang	menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitas

84	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai penerbitan keputusan	menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan
85	Hasil diagnosa/bedah kasus calon kelayan(penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	melindungi rahasia pribadi calon kelayan
86	Data kelayanan UPT(Penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitas/penanganan kelayan)	melindungi rahasia pribadi kelayan
87	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengukapan	Mengamankan proses penyusunan
88	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada gubernur	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penanggung upah minimum	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengupan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan

89		Pelaksanaan Pengawasan ketenagakerjaan (nota pemeriksaan dan BAP)	Pasal 5 UU No. 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang pengawasan perburuhan tahun 1948 NR 23 dari republik Indonesia untuk seluruh indonesia, UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha
		<b>BIDANG KOMINFO</b>				
90		Lokasi server	UU No. 11 th 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, pasal 25 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual melindungi/ mengamankan perangkat serta data
91		Internet Protocol/IP Adress private	UU No. 11 th 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, pasal 25 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	melindungi hak atas kekayaan intelektual menjaga/melindungi hak akses
92		Bandwith Management	UU No. 11 th 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, pasal 25 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwith di luar ketentuan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual mengatur kestabilan penggunaan bandwith

93		Sistem Manajemen Database	UU No. 14 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik, pasal 25 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/ berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual, Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Melindungi hak atas kekayaan intelektual menjaga keamanan jaringan komputer
		<b>BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA</b>				
94		Rencana penertiban/penindakan dan penegakan pada objek tertentu	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai dengan selesai dilaksanakan	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
95		Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)

96	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai selesainya kasus	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	(memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi
97	Informasi data pribadi penegak perda	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan		memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (personel dapat
98	Berita Acara Pemeriksaan	UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h, dan i	Selama proses pemeriksaan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dapat mengungkap rahasia pribadi objek diperiksa, Dapat menghambat proses kesuksesan proses penyusunan kebijakan	memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan Melindungi data-data pribadi objek diperiksa
99	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	UU No. 5 th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 1981, Pasal 70 ayat (2), UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	1 tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum

	<b>BIDANG KEUANGAN</b>				
100	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindahtanganan barang daerah	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
101	Database Objek Pajak dan Retribusi	UU No. 11 th 2008 tentang ITE Pasal 40, UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hukum yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan data base onjek pajak dan retribusi
102	Dokument Proses Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan dan etika pengadaan
103	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
104	Dokumen penawaran dari Penyedia barang/jasa	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilain/evaluasi penawaran
105	Susunan Kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokument

106	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi rahasia (data kekayaan)pribadi
107	Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	UU No. 17 th 2003 tentang keuangan negara, pasal 31 ayat(1) UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan
108	Kertas kerja pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

BUPATI PADANG PARIAMAN,

